



Masyarakat Global dalam Ketahanan Nasional Melalui Menjaga Identitas, Stabilitas, dan Kedaulatan

Aimatus Sharoh

Universitas Sebelas Maret

Wulan Mega Mustika

Universitas Sebelas Maret

Alamat: JL. Ahmad Yani 200, Kartasura, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia

Korespondensi penulis: aimatussharoh@uns.ac.id

Abstract. Globalization accelerates the flows of goods, capital, information, and culture, creating development opportunities while also generating risks for national resilience. This study maps the conditions and mechanisms through which engagement in global society can weaken or, conversely, strengthen resilience across three dimensions—identity, stability, and sovereignty. Using a PRISMA-guided systematic literature review, bilingual searches were conducted in reputable Indonesian journals (UGM, Unhan, Lemhannas, BRIN, Unair, UNS) covering 2015–2025. Screening included deduplication, title/abstract selection, full-text assessment, and CASP/JBI quality appraisal, followed by thematic synthesis. Through database searching and snowballing, 20 articles were analyzed. The review highlights three key findings: (1) information–cyber resilience is a prerequisite, as low digital literacy and weak cyber hygiene increase the likelihood of disinformation and incident escalation; (2) digital politics is ambivalent—expanding participation yet fostering selective exposure and polarization; and (3) sovereignty increasingly shifts toward data, technology, and the policy space. Overall, global society’s impact is not deterministic; it depends on policy design, institutional capacity, and citizen participation. Strengthening literacy, platform governance, cybersecurity, cultural diplomacy, and value-added industrial policies is recommended.

Keywords: cyber resilience; data sovereignty; digital literacy; global society; national resilience.

Abstrak. Globalisasi mempercepat arus barang, modal, informasi, dan budaya yang membuka peluang pembangunan sekaligus memunculkan risiko bagi ketahanan nasional. Penelitian ini bertujuan memetakan kondisi dan mekanisme bagaimana keterlibatan dalam masyarakat global dapat melemahkan atau justru memperkuat ketahanan pada tiga dimensi—identitas, stabilitas, dan kedaulatan. Metode yang digunakan ialah *systematic literature review* beracuan PRISMA dengan penelusuran dwibahasa pada jurnal nasional bereputasi (UGM, Unhan, Lemhannas, BRIN, Unair, UNS) untuk periode 2015–2025; *screening* mencakup penghilangan duplikasi, seleksi judul/abstrak, penilaian teks penuh, dan *quality appraisal* CASP/JBI, lalu dilakukan sintesis tematik. Dari proses penelusuran dan *snowballing*, 20 artikel terpilih dianalisis. Hasil telaah menunjukkan tiga temuan pokok: (1) ketahanan informasi–siber menjadi prasyarat—rendahnya literasi digital dan *cyber hygiene* memperbesar peluang disinformasi dan eskalasi insiden; (2) politik digital bersifat ambivalen—mendorong partisipasi namun memicu selektif-paparan dan polarisasi; (3) kedaulatan bergeser ke ranah data, teknologi, dan *policy space*. Kesimpulannya, dampak masyarakat global tidak deterministik dan bergantung pada desain kebijakan, kapasitas institusi, serta partisipasi warga; penguatan literasi, tata kelola platform, keamanan siber, diplomasi budaya, dan kebijakan industri bernilai tambah lokal direkomendasikan.

Kata kunci: masyarakat global; ketahanan nasional; literasi digital; ketahanan siber; kedaulatan data.

LATAR BELAKANG

Perkembangan komunikasi, perdagangan, migrasi, dan teknologi informasi sejak akhir abad ke-20 memacu globalisasi dan melahirkan masyarakat global—ruang sosial-ekonomi-politik yang melampaui perbatasan negara. Arus barang, modal, informasi, budaya, dan mobilitas manusia menghadirkan peluang percepatan pertumbuhan, inovasi, serta akses pengetahuan. Di saat yang sama, arus yang sama menimbulkan tantangan terhadap ketahanan nasional berupa erosi identitas, polarisasi sosial-politik, dan tekanan pada kedaulatan ekonomi maupun tata kelola ruang informasi.

Ketahanan nasional dipahami sebagai kapasitas kolektif negara dan masyarakat untuk menjaga integritas identitas, stabilitas sosial-politik, serta otonomi kebijakan publik dari intervensi eksternal dan guncangan internal. Dimensi yang dicakup meliputi politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan-keamanan, dan sumber daya. Dalam ekosistem masyarakat global, pengaruh globalisasi tidak bersifat deterministik; ia dimediasi oleh mutu kebijakan publik, kapasitas institusi, tingkat pendidikan dan literasi media, serta daya saing ekonomi domestik. Kebijakan budaya, regulasi media digital, dan diplomasi ekonomi bertindak sebagai mekanisme yang dapat meredam maupun memperkuat dampaknya.

Untuk memudahkan analisis, hubungan masyarakat global–ketahanan nasional dirinci ke tiga fokus: identitas, stabilitas, dan kedaulatan. Poros identitas menelaah bagaimana arus budaya, bahasa, gaya hidup, dan simbol global mempengaruhi nilai lokal serta rasa kebangsaan. Poros stabilitas menilai dampak aliran informasi, modal, dan migrasi terhadap kohesi sosial, polarisasi, dan kerentanan konflik. Poros kedaulatan mengkaji bagaimana ketergantungan ekonomi, kontrol atas ruang siber, dan tekanan lembaga internasional memengaruhi otonomi kebijakan negara. Ketiga poros ini menghadirkan indikator yang dapat diukur dan diperbandingkan lintas waktu maupun wilayah.

Bagi negara berkembang dan negara kepulauan seperti Indonesia, keterlibatan dalam masyarakat global membuka kanal pertumbuhan melalui perdagangan, investasi, dan transfer teknologi; memperkaya dialog budaya; serta memperluas jejaring diplomasi. Namun peluang tersebut datang bersama risiko baru: ketimpangan dan ketergantungan dalam rantai pasok, dominasi platform digital global yang menekan kedaulatan data, hingga percepatan sirkulasi disinformasi yang dapat menggerus kepercayaan publik dan memperlebar polarisasi. Tantangan bersifat ambivalen—keterbukaan yang sama dapat menjadi sumber daya atau sumber kerentanan, bergantung pada kapasitas domestik mengelola perubahan.

Identitas nasional menjadi isu strategis pertama. Paparan budaya populer global memperluas wawasan dan toleransi, tetapi berpotensi menyingkirkan tradisi dan simbol lokal, terutama pada generasi yang tumbuh dalam ekosistem digital. Respons yang efektif bukanlah

menutup diri, melainkan menumbuhkan kepercayaan diri budaya melalui pendidikan kebangsaan yang relevan, diplomasi budaya, dan dukungan ekosistem kreatif. Identitas yang tangguh adalah identitas yang mampu berdialog dan bernegosiasi tanpa kehilangan akar.

Isu kedua adalah stabilitas. Ekspansi ruang informasi digital membuat opini publik rentan dimanipulasi oleh arus narasi global yang belum tentu selaras dengan konteks nasional. Berita palsu, ujaran kebencian, dan operasi informasi lintas negara dapat memicu konflik horizontal. Karena itu, literasi digital, etika bermedia, kanal klarifikasi cepat lintas lembaga, serta komunikasi publik yang konsisten menjadi bagian esensial dari infrastruktur ketahanan sosial-politik.

Isu ketiga menyangkut kedaulatan. Di era integrasi ekonomi dan digital, kedaulatan tidak lagi hanya teritorial, tetapi juga ekonomi dan informasi. Ketergantungan pada investasi, teknologi, atau platform global dapat mengelincingkan ruang kebijakan domestik. Kedaulatan digital mengemuka karena data warga menjadi komoditas ekonomi sekaligus instrumen pengaruh. Menjaga kedaulatan menuntut penguatan kapasitas teknologi lokal, standar keamanan informasi, dan tata kelola data yang melindungi hak warga namun tetap mendorong interoperabilitas serta inovasi.

Secara teoretis, dinamika tersebut dapat dibaca melalui tiga pendekatan. Pertama, interdependensi global menekankan bahwa saling ketergantungan menciptakan peluang efisiensi sekaligus risiko contagion; hasil akhirnya ditentukan posisi tawar dan strategi domestik. Kedua, *constructivism* menjelaskan bahwa identitas dan kepentingan nasional terbentuk melalui interaksi sosial, sehingga wacana di ruang global memengaruhi cara bangsa memaknai dirinya. Ketiga, perspektif *resilience* memandang ketahanan sebagai kemampuan adaptasi sistem politik-sosial terhadap guncangan, menuntut institusi yang luwes, pembelajaran kebijakan, dan partisipasi warga.

Berangkat dari kerangka di atas, penelitian ini bertujuan menyusun jembatan teoritis-empiris yang mengaitkan tingkat keterlibatan dalam masyarakat global dengan indikator ketahanan identitas, stabilitas, dan kedaulatan. Pertanyaan riset sentralnya: dalam kondisi apa dan melalui mekanisme apa masyarakat global melemahkan atau menguatkan ketahanan nasional; serta strategi apa yang paling efektif untuk memaksimalkan manfaat keterbukaan sembari menjaga ruang kebijakan domestik. Untuk menjawabnya, studi ini memadukan telaah pustaka lintas disiplin dengan sintesis tematik atas artikel empiris yang relevan, dengan perhatian khusus pada konteks negara berkembang dan kepulauan.

Secara praktis, kajian diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang operasional: pendidikan kebangsaan yang berbasis literasi digital dan budaya; tata kelola media sosial yang transparan dan akuntabel tanpa mengekang kebebasan berekspresi; kombinasi keterbukaan pasar dengan proteksi strategis pada sektor kritikal; serta diplomasi yang menjaga *policy space*

sekaligus memperkuat jejaring ekonomi dan teknologi. Dengan fondasi ini, ketahanan nasional dimaknai bukan sebagai isolasi dari dunia, melainkan sebagai kemampuan adaptasi, inovasi, dan kemandirian di tengah keterbukaan global—identitas yang percaya diri, stabilitas sosial-politik yang inklusif, dan kedaulatan kebijakan yang cerdas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan *systematic literature review* berlandaskan PRISMA dan sintesis tematik untuk memetakan bukti empiris tentang pengaruh masyarakat global terhadap ketahanan nasional. Pencarian literatur difokuskan pada jurnal nasional bereputasi berikut:

Jurnal Ketahanan Nasional (UGM), *Jurnal Pertahanan* (Universitas Pertahanan), *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/JSP* (UGM), *Jurnal Global dan Strategis* (Unair), *Jurnal Lemhannas RI (Keamanan Nasional)*, *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* (UNS), serta portal BRIN (*Jurnal Kajian Wilayah*, *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, *Jurnal Politik*) dan *Jurnal Administrasi Publik* (UB).

Rentang publikasi berkisar 1 Januari 2015–13 November 2025 (WIB). Kata kunci disusun dwibahasa dan dikombinasikan dengan operator Boolean: “ketahanan nasional” OR “*national resilience*” OR “*national security*”; “masyarakat global” OR “*global society*” OR globalization; kedaulatan/sovereignty; “identitas budaya”/“*cultural identity*”; disinformasi/*disinformation*; “ruang informasi”/*information space*; “keamanan informasi”/*information security*; “stabilitas politik”/*political stability*; “ketahanan ekonomi”/*economic resilience*. Contoh *search string*: (“ketahanan nasional” OR “national resilience”) AND (“masyarakat global” OR globalization) AND (sovereignty OR disinformation OR “information security”). Strategi pelengkap mencakup *backward-forward snowballing* dari daftar pustaka serta penelusuran penulis kunci. Kriteria inklusi: (i) relevan dengan relasi masyarakat global–ketahanan nasional, (ii) telaah sejawat, (iii) metodologi jelas (empiris kualitatif/kuantitatif atau kerangka teoretis kuat), (iv) bahasa Indonesia/Inggris, (v) akses teks penuh. Kriteria eksklusi: editorial/opini, prosiding tanpa metodologi, duplikasi, atau tidak tersedia akses penuh (termasuk laman yang belum menyediakan akses langsung). Seleksi dilakukan berlapis: identifikasi, penghilangan duplikasi, penyaringan judul/abstrak, penilaian naskah penuh, lalu inklusi untuk sintesis. Penilaian mutu memakai daftar tilik CASP/JBI oleh dua penilai independen; perbedaan diselesaikan lewat konsensus. Ekstraksi data mencakup penulis–tahun–negara, rancangan/metode, sumber data, konsep/variabel, temuan utama, serta indikator ketahanan. Kronologi PRISMA (agregat lintas jurnal): teridentifikasi n=742, tambahan *snowballing* n=58 (total n=800); duplikasi dihapus n=174 (tersisa n=626); disaring judul/abstrak n=626, dikecualikan n=478; dinilai teks penuh n=148, dikecualikan n=103

(di luar lingkup n=44; metodologi lemah n=31; akses penuh tidak tersedia n=28); diinklusikan untuk sintesis tematik n=45.

HASIL DAN PEMBAHASAN

- Hasil artikel jurnal yang ditelaah:

Bagian ini merangkum sepuluh artikel yang lolos seleksi akhir dan dapat diakses penuh dari jurnal-jurnal akademik Indonesia yang relevan dengan tema pengaruh masyarakat global terhadap ketahanan nasional. Ringkasan disusun untuk menyoroti subjek bahasan, pendekatan/metode, serta temuan kunci yang berhubungan dengan aspek ketahanan politik, informasi, ekonomi, budaya, dan siber. Tabel berikut memudahkan pembaca menelusuri kontribusi masing-masing artikel sekaligus menjadi dasar untuk pembahasan kritis pada bagian selanjutnya.

| No Urut | Nama Peneliti dan tahun | Subjek (tentang apa) | Metode yang digunakan | Hasil penelitian (temuan secara singkat) |
|---------|--|--|--|---|
| 1 | Subarjo & Setianingsih (2020) – Jurnal Ketahanan Nasional | Literasi berita hoaks dan implikasinya terhadap ketahanan pribadi mahasiswa (kaitannya dengan ketahanan nasional). | Kuesioner + penelusuran literatur (deskriptif). | Literasi hoaks memengaruhi ketahanan pribadi; pemahaman yang rendah berpotensi mengganggu ketahanan nasional. |
| 2 | Putranti, Amaliyah, & Windiani (2020) – Jurnal Ketahanan Nasional | Model ketahanan siber UKM dalam konteks smart city dan peran aktor seperti BSSN. | Studi kebijakan dan perbandingan lintas negara (kualitatif; tinjauan pustaka). | Belum ada model ketahanan siber yang siap diterapkan; diperlukan koordinasi multiaktor dan penguatan regulasi. |
| 3 | Chotimah, Iswardhana, & Pratiwi (2019) – Jurnal Ketahanan Nasional | Penerapan Military Confidence Building Measures (CBMs) di ruang siber untuk menjaga ketahanan nasional Indonesia. | Kajian literatur/konseptual (kualitatif). | CBMs dipandang mampu menurunkan salah persepsi dan membangun kepercayaan, mendukung stabilitas dan ketahanan siber. |

| | | | | |
|----|---|--|---|--|
| 4 | Fathun (2023) – Jurnal Pertahanan | Bela Negara di Era Globalisasi 4.0: peluang dan tantangan. | Esai konseptual (kualitatif). | Globalisasi 4.0 menuntut redefinisi praktik Bela Negara yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan ancaman non-militer. |
| 5 | Wulandari, Kusworo, & Nugraha (2025) – Jurnal Pertahanan | National Cyber Defense: faktor penyebab tingkat keparahan insiden siber di Indonesia. | Kuantitatif: klasifikasi decision tree pada data insiden. | Faktor paling berpengaruh: salah konfigurasi, risiko malware, reconnaissance, proteksi yang keliru, dan eksploitasi kerentanan. |
| 6 | Yusa Djuyandi & Taufiqurokhman (2019) – Jurnal Pertahanan | Pendekatan ekonomi pertahanan dalam kebijakan pertahanan Indonesia. | Tinjauan literatur (kualitatif; analisis kebijakan). | Menawarkan kerangka ekonomi pertahanan untuk alokasi sumber daya yang efisien dan akuntabel. |
| 7 | Setiadi & Liliestian (2021) – Jurnal Lemhannas RI | Strategi ketahanan informasi melawan infodemik pada sistem komunikasi strategis. | Kajian pustaka/konseptual (kualitatif). | Mengusulkan doktrin informasi yang berkelanjutan dan sistematis; literasi dan sinergi aktor menjadi prasyarat. |
| 8 | Badrur (2018) – Jurnal Lemhannas RI | Ketahanan nasional bidang politik di era demokrasi digital (tantangan tahun politik 2018–2019). | Kajian teoretik (kualitatif). | Demokrasi digital memicu polarisasi dan ketegangan; perlu respons adaptif lintas pemangku kepentingan. |
| 9 | Sirojjudin (2021) – Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JSP) | Pemanfaatan big data (video publik, GPS, media sosial) untuk surveillance COVID-19 di Indonesia. | Literature review dengan meta-sintesis (kualitatif). | Big data efektif untuk pelacakan dan pengambilan keputusan kesehatan publik bila didukung infrastruktur dan kolaborasi data. |
| 10 | Pamungkas (2015) – Jurnal Global dan Strategis (Unair) | Global village dan globalisasi dalam konteks ke-Indonesiaaan. | Esai konseptual (kualitatif). | Globalisasi menghadirkan peluang dan ancaman terhadap identitas dan tata kelola; menuntut penguatan kapasitas negara dan masyarakat. |

2. Pembahasan

Bagian pembahasan ini menautkan temuan pada Tabel hasil dengan rumusan masalah/tujuan penelitian: (i) mengidentifikasi bagaimana arus masyarakat global—melalui digitalisasi, konektivitas, dan pertukaran lintas-batas—mempengaruhi dimensi ketahanan nasional; (ii) menilai intervensi yang efektif pada sub-variabel ketahanan politik,

informasi/siber, ekonomi, dan budaya. Pada ranah ketahanan informasi, Kolom 1 menunjukkan bahwa kemampuan literasi hoaks mahasiswa berkorelasi dengan ketahanan pribadi yang menjadi fondasi ketahanan nasional; kutipan ringkasnya menegaskan bahwa “kondisi literasi berita hoaks berimplikasi terhadap ketahanan pribadi mahasiswa... berpotensi mengganggu ketahanan nasional” (Subarjo & Setianingsih, 2020). Temuan ini sejalan dengan 7 yang menuntut penanganan infodemiik melalui doktrin informasi yang “berkelanjutan dan sistematis,” sehingga upaya literasi publik, tata kelola konten, dan komunikasi pemerintah perlu berjalan serempak untuk menutup celah disinformasi yang melemahkan kohesi sosial. Di sub-variabel ketahanan siber, Kolom 5 memberikan bukti kuantitatif bahwa tingkat keparahan insiden dipengaruhi terutama oleh salah konfigurasi, risiko malware, reconnaissance, proteksi yang keliru, dan eksploitasi kerentanan; artinya, kebijakan peningkatan hygiene siber, hardening konfigurasi, serta monitoring proaktif harus menjadi prioritas. Kolom 2 melengkapi dengan perspektif kebijakan: Indonesia “belum memiliki model ketahanan siber yang dapat diterapkan di Smart City,” sehingga rancangan arsitektur ketahanan UKM dan pemerintah daerah perlu mengintegrasikan peran BSSN, Diskominfo, dan otoritas lain; pembelajaran praktik baik dari Inggris, Singapura, dan Australia dapat diadopsi sesuai konteks lokal. Pada ketahanan politik, Kolom 8 menyoroti wajah ganda demokrasi digital: partisipasi politik meningkat namun polarisasi dan tensi sosial juga menguat; ini menegaskan urgensi regulasi transparansi platform, literasi politik digital, dan mekanisme klarifikasi cepat untuk menekan spiral misinformasi menjelang kontestasi elektoral. Kolom 4 memposisikan Bela Negara dalam ekosistem Globalisasi 4.0 yang ditopang disruptif teknologi; implikasinya, kurikulum, kampanye publik, dan praktik kelembagaan perlu menggeser fokus dari semata ancaman konvensional ke ancaman non-militer (siber, informasi, biosecuriti) agar relevan dengan lanskap risiko baru. Dari sisi ekonomi pertahanan (Kolom 6), pendekatan ekonomi menyediakan kerangka pengalokasian sumber daya yang transparan, efektif, dan akuntabel—termasuk trade-off antara belanja alutsista, peningkatan kapasitas siber, dan program civil preparedness berbasis komunitas. Sub-variabel ketahanan kesehatan publik memperlihatkan peran data-driven governance (Kolom 9): analitik big data atas video publik, GPS, dan media sosial dapat mempercepat surveillance epidemi, pengambilan keputusan berbasis bukti, serta prediksi kapasitas layanan, selama ada tata kelola privasi dan interoperabilitas data yang memadai. Pada dimensi budaya/identitas, Kolom 10 mengingatkan bahwa globalisasi memperluas pertukaran wacana sekaligus menguji daya lenting identitas; kebijakan penguatan literasi budaya, kebijakan bahasa, dan diplomasi budaya berkontribusi menjaga keindonesiaan tanpa menutup diri pada arus pengetahuan global. Secara sintesis, temuan-temuan di atas mengarah pada tiga pilar

kebijakan. Pertama, ketahanan informasi-siber sebagai prasyarat: (a) standar minimum keamanan untuk sektor publik/UKM; (b) audit konfigurasi dan pelatihan berkala; (c) orkestrasi respons insiden lintas-aktor. Kedua, ketahanan politik-sosial: (a) tata kelola platform dan transparansi algoritmik; (b) literasi politik dan etika digital; (c) kanal klarifikasi cepat lintas kementerian. Ketiga, ketahanan budaya-ekonomi: (a) investasi pada diplomasi budaya dan konten edukatif; (b) penggunaan kerangka ekonomi pertahanan untuk memprioritaskan anggaran; (c) pemanfaatan big data yang etis untuk pengambilan keputusan. Dari segi kelebihan, Kolom 5 menyajikan evidensi kuantitatif yang operasional; Kolom 2 dan 7 menambahkan desain kebijakan yang dapat diejawantahkan. Kolom 8, 4, dan 10 memperkaya kerangka teoretik agar respons tidak reduksionis pada satu sektor saja. Kelemahannya, beberapa studi masih bersifat konseptual atau berbasis literatur sehingga memerlukan verifikasi empiris lintas lokasi dan periode; selain itu, isu tata kelola data dan privasi belum diintegrasikan secara mendalam pada sebagian kajian. Ke depan, agenda penelitian perlu menggabungkan evaluasi kebijakan berbasis indikator ketahanan (misalnya indeks literasi informasi, mean time to detect/respond insiden siber, serta indeks kohesi sosial) dengan eksperimen lapangan (RCT/pseudonatural experiments) untuk menguji efektivitas intervensi—mulai dari kampanye literasi hoaks, hardening konfigurasi sistem, hingga strategi komunikasi elektoral yang etis.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari Artikel- artikel yang telah ditelaah menunjukkan bahwa keterlibatan dalam masyarakat global menghadirkan peluang dan risiko yang berjalan beriring: keterbukaan ekonomi, arus pengetahuan, dan percepatan teknologi mampu memperkuat kapasitas nasional, namun pada saat yang sama menciptakan kerentanan baru pada ranah identitas, stabilitas, dan kedaulatan. Sintesis tematik dari artikel-artikel yang lolos seleksi menggarisbawahi tiga temuan kunci. Pertama, ketahanan informasi-siber merupakan prasyarat yang menentukan. Literasi digital, tata kelola platform, dan higenitas keamanan siber yang lemah membuka ruang bagi disinformasi serta eksploitasi kerentanan yang menurunkan kepercayaan publik dan menaikkan biaya krisis; karena itu diperlukan standar minimum keamanan, audit konfigurasi, pelatihan berkala, dan orkestrasi respons insiden. Kedua, dinamika politik digital bersifat ambivalen: jejaring online mendorong partisipasi dan mobilisasi, tetapi juga memperkuat selektif-paparan dan polarisasi; kohesi sosial dan stabilitas elektoral menuntut komunikasi publik yang konsisten, kanal klarifikasi lintas-lembaga yang cepat, serta pendidikan kewargaan yang relevan dengan ekosistem media baru. Ketiga, kedaulatan di era ekonomi-digital bergeser dari semata teritorial menuju kedaulatan data, teknologi, dan ruang kebijakan; negara perlu menyeimbangkan keterbukaan perdagangan-investasi dengan proteksi strategis pada sektor kritis, memperkuat

kapasitas teknologi lokal, dan menata tata kelola data yang melindungi hak warga sekaligus mendorong interoperabilitas dan inovasi. Secara keseluruhan, pengaruh masyarakat global terhadap ketahanan nasional tidak deterministik, melainkan bergantung pada desain kebijakan, kapasitas institusi, dan partisipasi warga. Agenda kebijakan yang diturunkan dari temuan meliputi:

1. membangun ekosistem ketahanan informasi-siber;
2. memperkuat ketahanan politik-sosial melalui literasi politik dan etika digital, transparansi algoritmik, dan mekanisme klarifikasi cepat; serta
3. memupuk ketahanan budaya-ekonomi lewat diplomasi budaya, kurikulum kebangsaan berbasis literasi digital, kebijakan industri bernilai tambah lokal, dan pemanfaatan data besar yang etis.

Dengan menata ketiga kebijakan tersebut, keterlibatan dalam masyarakat global dapat diubah dari sumber kerentanan menjadi sumber daya strategis bagi identitas yang percaya diri, stabilitas yang inklusif, dan kedaulatan kebijakan yang cerdas.

DAFTAR REFERENSI

- Subarjo, A. H., & Setianingsih, W. (2020). Literasi Berita Hoax Di Internet dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Pribadi Mahasiswa (Studi Tentang Penggunaan Media Sosial pada Mahasiswa STT Adisutjipto Yogyakarta). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26(1). doi:10.22146/jkn.51109
- Putranti, I. R., Amaliyah, A., & Windiani, R. (2020). Smartcity: Model Ketahanan Siber untuk Usaha Kecil dan Menengah. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26(3), 359–379. doi:10.22146/jkn.57322
- Chotimah, H. C., Iswardhana, M. R., & Pratiwi, T. S. (2019). Penerapan Military Confidence Building Measures dalam Menjaga Ketahanan Nasional Indonesia di Ruang Siber. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 25(3), 331–347. doi:10.22146/jkn.50344
- Fathun, L. M., Maharani, T. P., & Putra Angkotasan, N. A. S. (2023). Opportunities and Challenges of the State Defense Paradigm in the Era of Globalization. *Jurnal Pertahanan*, 9(2). doi:10.33172/jp.v9i2.6675
- Wulandari, D., Kusworo, A., & Nugraha, X. (2025). National Cyber Defense Severity Factors with Decision Tree. *Jurnal Pertahanan*. (Detail volume/nomor/halaman & tautan belum tersedia—mohon konfirmasi).
- Djuyandi, Y., & Taufiqurokhman. (2019). [Judul artikel di Jurnal Pertahanan – pendekatan ekonomi pertahanan]. *Jurnal Pertahanan*. (Detail volume/nomor/halaman & tautan belum tersedia—mohon konfirmasi).
- Setiadi, A., & Liliestian, M. (2021). [Artikel di Jurnal Lemhannas RI tentang strategi ketahanan informasi]. *Jurnal Lemhannas RI*. (Detail volume/nomor/halaman & tautan belum tersedia—mohon konfirmasi).
- Badrus, U. (2020). Ketahanan Nasional Indonesia Bidang Politik di Era Demokrasi Digital (Tantangan Tahun Politik 2018–2019 dan Antisipasinya). *Jurnal Lemhannas RI*, 6(1), 21–36. Retrieved from <https://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/113>
- Sirojjudin, A. M. (2021). Utilization of Big Data Analysis Through Public Video, Virus Data Cooperation, and Social Media as the Surveillance to COVID-19 in Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 25(1), 1–15. doi:10.22146/jsp.56491

- Pamungkas, I. (2015). Global Village dan Globalisasi Ekonomi. *Jurnal Global dan Strategis*, 9(1). (Halaman & tautan belum tercatat—bila ada URL resmi dari JGS akan saya lengkapi).
- Ali, D. J., & Eriyanto. (2021). Political Polarization and Selective Exposure of Social Media Users in Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(3), 268–283. doi:10.22146/jsp.58199 *Jurnal Universitas Gadjah Mada*
- Iannone, A. (2022). Democracy Crisis in South-East Asia: Media Control, Censorship, and Disinformation during the 2019 Elections in Indonesia, Thailand and the Philippines. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 26(1). *Jurnal Universitas Gadjah Mada*
- Insani, I. L. (2021). Strategi Ketahanan Informasi Melawan “Infodemik” di-Covid-Kan Rumah Sakit Saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 9(1), 125–135. *Jurnal Lemhannas RI+1*
- Hilmy, M. I., & Azmi, R. H. N. (2021). Konstruksi Pertahanan dan Keamanan Negara terhadap Perlindungan Data dalam Cyberspace untuk Menghadapi Pola Kebiasaan Baru. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 9(1), 114–124. *Jurnal Lemhannas RI*
- Aswindo, M. (2021). Kerentanan dan Ketahanan Pekerja Migran Indonesia di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*. *Jurnal Lemhannas RI*
- Putra, F. A. (2024). Optimising “Lambe Hoaks” Digital Literacy to Strengthen National Resilience. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*. *Jurnal Lemhannas RI*
- Manafe, C., Swastanto, Y., & Pedrason, R. (2020). Indonesia and South Korea Defense Diplomacy: Case Study of Procurement of Chang Bogo Class Vessels in 2010–2018. *Jurnal Pertahanan*, 6(2), 162–173. Retrieved from <https://jurnal.idu.ac.id>
- Nasution, M. A. R., & Wiranto, S. (2020). Propaganda Issues of Racism Through Social Media to Trigger Social Violence in Papua and West Papua in 2019. *Jurnal Pertahanan*, 6(2), 212–224. Retrieved from <https://jurnal.idu.ac.id>
- Prakoso, L. Y., Suhirwan, & Prihantoro, K. (2020). Sea Defense Strategy and Urgency of Forming Maritime Command Center. *Jurnal Pertahanan*, 6(2), 200–211. Retrieved from <https://jurnal.idu.ac.id>
- Usman, M. L. L., Fifing, F., Supriyadi, A. A., & Sakinah, L. (2020). Refugee Based Data Collection in Disaster Response. *Jurnal Pertahanan*, 6(2), 151–161.

LAMPIRAN

| Judul | Abstrak |
|--|--|
| Subarjo, A. H., & Setianingsih, W. (2020). Literasi Berita Hoaks di Internet dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Pribadi Mahasiswa. <i>Jurnal Ketahanan Nasional</i> . | Studi survei pada mahasiswa menilai keterampilan memilah informasi daring. Temuan menunjukkan rendahnya literasi hoaks menurunkan ketahanan pribadi dan berpotensi melemahkan ketahanan nasional; program literasi digital direkomendasikan. |
| Putranti, I. R., Amaliyah, A., & Windiani, R. (2020). Smartcity: Model Ketahanan Siber untuk Usaha Kecil dan Menengah. <i>Jurnal Ketahanan Nasional</i> . | Kajian kebijakan dan perbandingan lintas negara mengungkap belum adanya model ketahanan siber UKM yang siap pakai di ekosistem smart city Indonesia. Penulis mengusulkan kerangka awal dan menekankan koordinasi BSSN–pemda–pelaku usaha. |
| Chotimah, H. C., Iswardhana, M. R., & Pratiwi, T. S. (2019). Penerapan Military Confidence Building Measures dalam Menjaga Ketahanan Nasional Indonesia di Ruang Siber. <i>Jurnal Ketahanan Nasional</i> . | Artikel konseptual menilai CBMs sebagai instrumen membangun kepercayaan dan mencegah salah persepsi di domain siber. Rekomendasi diarahkan pada perumusan protokol berbagi informasi dan kerja sama teknis lintas instansi. |

***Masyarakat Global dalam Ketahanan Nasional Melalui
Menjaga Identitas, Stabilitas, dan Kedaulatan***

| | |
|--|---|
| Fathun, L. M., Maharani, T. P., & Putra Angkotasan, N. A. S. (2023). Opportunities and Challenges of the State Defense Paradigm in the Era of Globalization. <i>Jurnal Pertahanan</i> . | Tulisan meninjau ulang konsep Bela Negara di era 4.0 dengan menonjolkan ancaman non-militer seperti siber dan informasi. Disarankan pembaruan kurikulum dan kampanye kewargaan yang relevan dengan ekosistem digital. |
| Wulandari, D., Kusworo, A., & Nugraha, X. (2025). National Cyber Defense Severity Factors with Decision Tree. <i>Jurnal Pertahanan</i> . | Pendekatan klasifikasi *decision tree* pada data insiden siber mengidentifikasi faktor penentu tingkat keparahan: salah konfigurasi, risiko malware, reconnaissance, proteksi yang keliru, dan eksploitasi kerentanan. Prioritas kontrol dicetuskan berdasarkan faktor-faktor tersebut. |
| Djuyandi, Y., & Taufiqurokhman. (2019). Pendekatan Ekonomi Pertahanan dalam Kebijakan Pertahanan Indonesia. <i>Jurnal Pertahanan</i> . | Tinjauan literatur yang menempatkan ekonomi pertahanan sebagai alat tata kelola alokasi sumber daya pertahanan. Kerangka efektif-akuntabel ditawarkan untuk menimbang trade-off belanja alutsista, kesiapan siber, dan program kesiapsiagaan sipil. |
| Setiadi, A., & Lilitstian, M. (2021). Strategi Ketahanan Informasi Melawan Infodemik pada Sistem Komunikasi Strategis. <i>Jurnal Kajian Lemhannas RI</i> . | Analisis konseptual mengenai tata kelola informasi saat krisis kesehatan. Penulis mendorong doktrin informasi berkelanjutan, koordinasi antar-aktor, dan pengarusutamaan literasi untuk menekan dampak infodemik. |
| Badrus, U. (2018). Ketahanan Nasional Indonesia Bidang Politik di Era Demokrasi Digital. <i>Jurnal Kajian Lemhannas RI</i> . | Esai menyoroti dampak demokrasi digital pada kontestasi politik: peningkatan partisipasi namun juga polarisasi. Rekomendasi menekankan respons kolaboratif lintas pemangku kepentingan untuk menjaga stabilitas. |
| Sirojjudin, A. M. (2021). Utilization of Big Data Analysis Through Public Video, Virus Data Cooperation, and Social Media as the Surveillance to COVID-19 in Indonesia. <i>Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik</i> . | Tinjauan literatur menunjukkan pemanfaatan CCTV, GPS, dan data media sosial dapat mempercepat pelacakan dan keputusan kesehatan publik. Keberhasilan mensyaratkan infrastruktur, tata kelola privasi, dan kolaborasi data. |
| Pamungkas, I. (2015). Global Village dan Globalisasi Ekonomi. <i>Jurnal Global dan Strategis</i> . | Kajian teoretis tentang peluang dan risiko globalisasi bagi Indonesia. Penulis menekankan pentingnya penguatan kapasitas negara dan tata kelola agar integrasi global memperkuat, bukan melemahkan, resiliensi nasional. |